

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Pati secara bertahap terus berbenah untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya *good governance*. Salah satu cara mengimplementasikan *good governance* adalah dengan menerapkan prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang mana menimbulkan tuntutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, dengan diterapkannya prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, diharapkan mampu mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Pati.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Penulis mengadakan penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada narasumber, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur di bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci, jelas, dan menyeluruh tentang penerapan prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Pati.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai urgensi penerapan prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Pati serta bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Pati.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini membuktikan bahwa penerapan prinsip *value for money* dalam kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Pati memiliki peran yang penting, sebab implementasi kebijakan tersebut tidak hanya berpatok pada bagaimana standar yang ditetapkan pada visi & misi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pati itu terpenuhi, namun juga dihadapkan pada kompetisi antar daerah. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan pada Kabupaten Pati sudah dapat terwujud *good governance* karena sudah memenuhi ketiga indikator *value for money*, yakni ekonomis, efisien, dan efektif.

Kata kunci: kebijakan; pengadaan barang/jasa pemerintah; *e-procurement*; *value for money*; *good governance*.